

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azmi Fendri . 2016 . *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah* . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Jum Anggriani . 2012 . *Hukum Administrasi Negara* . Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mas'ud Said . 2008 . *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ni'matul Huda . 2013 . *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Prajudi Atmosudirjdo . 1994 . *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR . 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Salim HS . 2013 . *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Siswanto Sunarno . 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto . 1986 . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Pers.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian (Populer dan Praktis)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin. 2010 . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 26 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 26 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 120 tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

C. Jurnal

Achdiat dan Yahya Mulyana. 2017. *“Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian Dalam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat”*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, Sosiohumanira.

Bagoes IK, Djoko S, & Anton, *“Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat”* Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 4.

Siti Lindriati, Irawan Suntoro & Berchah Pitoewas. 2017. *“Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo”*, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

D. Internet

<https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>, diakses, 24 April 2018, waktu 23.58 WIB.

<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/kependudukan/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/index.html> Diakses, 6 Mei 2018, waktu 23.45 WIB.

<https://agusroniarbaben.wordpress.com/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang> diakses, 6 Mei 2018, waktu 00.45 WIB.

<https://www.hukumonline.com/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara> (diakses Minggu, 23/09/2018 : 22.30 WIB)

